

## ABSTRAK

Suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, maka dapat dilakukan proses hukum yang dimulai dengan penyelidikan untuk selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara tersebut. Dalam hal pelaksanaan tugasnya, Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya paksa. Perlakuan terhadap tersangka harus manusiawi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta rasa keadilan. Sebagai konsekuensinya maka pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, tersangka atau terdakwa tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang sebagai pihak yang semata-mata dianggap bersalah. Adapun permasalahan Bagaimana Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan dengan KUHAP? Apa faktor penghambat Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai Dihubungkan dengan KUHAP?

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Legalitas Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

Perkara praperadilan Nomor 22/Pid.Pra/2019/PN Pbr ditinjau dari legalitas penyidik dalam melakukan penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka bahwa termohon sebagai penyidik telah melakukan pelanggaran merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Selain itu merujuk pada aturan Pasal 77 dan 79 KUHAP penyidik melakukan penyitaan penggeledahan dan penetapan tersangka dengan tidak melibatkan atau didampingi saksi-saksi terutama ketua RT, tidak ada memberikan surat tanda penerimaan atas penyitaan barang-barang, dan tidak menunjukkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru. Faktor Penghambat dan upaya Penyitaan Barang Bukti dalam Praperadilan Tindak Pidana Cukai yaitu minimnya informasi, disinformasi, miskomunikasi, maupun waktu untuk mencari pasal-pasal dan menetapkan status tersangka dalam perkara pidana cukai dilakukan penyidik yang kerap menemui kesulitan dalam penerapan teknik penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Proses penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dianggap penyidik menjadi terhambat, karena Penyidik harus segera menyita barang bukti tersebut tetapi di sisi lain harus melalui proses permintaan izin dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya menimbulkan permasalahan terutama dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

## ABSTRACT

An event that should be suspected as a criminal offence, then legal proceedings that begin with an investigation to further be upgraded to investigation, prosecution, and adjudicate the case. In the event of the execution of its duties, the Criminal Event Law authorizes the authorities to perform actions as a forced effort. The treatment of suspects must be humane and uphold human rights and a sense of justice. As a consequence, at all levels of examination in the judicial process, the suspect or defendant should not be treated arbitrarily as a party solely presumed guilty. As for the issue of How is the Legality of Confiscation of Evidence in the Pretrial Of Tax Crimes Linked to Criminal Proceedings Act? What are the factors of obstruction of The Legality of Confiscation of Evidence in pretrial tax crimes linked to Criminal Proceedings Act?

The research method used is to use normative juridical research methods, namely legal research conducted by reviewing and testing secondary data in the form of positive laws, especially in the field of criminal law related to the Legality of Confiscation of Evidence in the Pretrial Of Excise Crimes linked to the Criminal Law. While data analysis uses qualitative juridical methods, namely data to be processed and qualitatively analyzed from library data and other sources which are then systematically compiled to be analyzed qualitatively and presented descriptively.

Pretrial case No. 22/Pid.Pra/2019/PN Pbr is reviewed from the legality of the investigator in carrying out the seizure, search and determination of the suspect that the respondent as the investigator has committed an offence referring to the provisions of Article 1 number 2 Criminal Proceedings Act. In addition, referring to the rules of Article 77 and 79 kuhap investigators carry out the seizure of search and determination of suspects by not involving or accompanied by witnesses especially the chairman of neighbor's pillars, there is no receipt letter for the confiscation of goods, and does not show a license from the Head of Pekanbaru District Court. The factors of obstruction and attempted confiscation of evidence in the Pretrial tax crimes are the lack of information, disinformation, miscommunication, and time to search the articles and establish the status of suspects in tax crimes carried out by investigators who often find difficulty in the application of arrest techniques, searches, and confiscation of evidence. The process of investigating with a license from the Head of district court, considered the investigator to be hampered, because the Investigator must immediately confiscate the evidence but on the other hand must go through the process of requesting permission first from the Head of the District Court. In addition, the power of discretion that is so broad and less clear the boundaries pose problems especially with the principles of criminal law namely the principle of legal certainty and human rights.